Majalah Digital Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur

ASPIRASI kita

Edisi 22

Monthly Report

Fraksi PKS DPRD JATIM

Jejak Pengabdian Fraksi PKS
DPRD Provinsi Jawa Timur

OKTOBER 2026

fraksipksjatim
www.fraksipksjatim.id

Daftar Isi

Sampul Halaman 1
Daftar Isi 2
Profil Singkat Dewan 3
Ringkasan Kinerja Fraksi 4-20
Kiprah Dewan 21-50
Galeri Foto Kegiatan 51-57
Penutup 58

PIMPINAN FRAKSI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI JAWA TIMUR 2025 -2029



Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Jatim selama Oktober 2026:



Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Senin, 5 Oktober 2026

1. Penyampaian Pendapat Gubernur atas Penjelasan Rancangan Perda tentang a. Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Produk Halal b. Pengembangan Hilirisasi Peternakan
2. Penyampaian Penjelasan Pimpinan Komisi D (Pembangunan) atas Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Trasportasi Publik Terintegrasi Jawa Timur

Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026








Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Jatim selama Oktober 2026:



Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Senin, 12 Oktober 2026

Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 81 Tahun 2026

Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026













Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Jatim selama Oktober 2026:



Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Kamis, 15 Oktober 2026

1. Jawaban Pemerintah Provinsi oleh Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terkait Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027
2. Penyampaian Laporan Pembahasan oleh Komisi A atas Hasil Pembahasan Rancangan Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
3. Penyampaian Pendapat Gubernur atas Penjelasan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Trasportasi Publik Terintegrasi Jawa Timur

Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Jatim selama Oktober 2026:



Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Senin, 19 Oktober 2026

1. Penyampaian Laporan Pembahasan oleh Komisi C atas Hasil Pembahasan Rancangan Perda tentang a. Perusahaan Perseroan Daerah Jatim Grha Utama b. Perusahaan Perseroan Daerah Panca Wira Usaha Jawa Timur
2. Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi atas Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Perda tentang a. Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Produk Halal b. Pengembangan Hilirisasi Peternakan
3. Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi atas Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Trasportasi Publik Terintegrasi Jawa Timur

Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Jatim selama Oktober 2026:



Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Rabu, 28 Oktober 2026

1. Penetapan Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Timur Tahun 2027
2. Penetapan Rencana Kerja DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027
3. Penyampaian Laporan Komisi-Komisi atas Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027

Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026













Recap 1 Oktober 2026

Agenda Komisi dan Badan



Mengawal kebijakan memperkuat pembangunan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Mencermati penguatan literasi kepemudaan dan keolahragaan dari Yogyakarta



Komisi E DPRD Jawa Timur berdiskusi bersama DPRD serta dinas pendidikan pemuda dan olahraga Provinsi D.I Yogyakarta sebagai upaya inventarisasi masalah untuk mendukung pembahasan Raperda Provinsi Jawa Timur tentang penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan



Perkuat infrastruktur tertibkan pengelolaan pertambangan di jember komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan PemKab Jember serta UPT PJJ DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur diJember guna mempercepat penanganan kerusakan jalan jembatan sekaligus memonitoring program kerja P-APBD 2026 serta progres pembangunan jembatan setong sampai Bondowoso







Mengawal pembentukan dana cadangan Pilgub Jatim komisi A DPRD Jawa Timur berkonsultasi dengan komisi II DPR RI serta mahkamah konstitusi RI langkah ini diambil guna memperdalam pembahasan terkait penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi Jawa Timur tentang pembentukan dana cadangan pemilihan gubernur dan wakil gubenur jawa timur

Recap 2-8 Oktober 2026

Agenda Komisi dan Badan



Merancang Kesiapan Pilgub Jawa Timur. Di balik proses demokrasi yang berjalan baik, ada perencanaan yang matang, termasuk dalam hal pembiayaan. Komisi A bersama KPU & Bawaslu Jatim di Bakorwil | Madiun membahas Rancangan Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Ini menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan pembiayaan Pilgub dapat dipersiapkan secara terencana, terukur, dan sesuai aturan. Bakorwil I Madiun 2-3 Oktober 2026



Memastikan Akses Pendidikan Terus Diperbaiki. Pasca pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026-2027, Komisi E DPRD Jawa Timur bersama Dinas Pendidikan Jatim turun langsung ke Kota Malang dan Kota Batu untuk melakukan monitoring dan evaluasi agar berbagai kendala di lapangan dapat diidentifikasi sebagai bahan perbaikan untuk mendorong pelaksanaan SPMB yang sesuai ketentuan dan semakin baik ke depannya. Kota Malang dan Kota Batu 2-3 Oktober 2026

Pemuda Berdaya, Masa Depan Jawa Timur Kota Malang 3-4 Oktober 2026. Pemuda memiliki peran penting dalam menentukan arah masa depan Jawa Timur. Karena itu, penguatan kapasitas dan potensi generasi muda perlu didukung melalui kebijakan yang berkelanjutan. Dalam Focus Group Discussion (FGD) Komisi E DPRD Jawa Timur berdiskusi terkait pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan, dengan fokus pada penguatan peran pemuda agar semakin berdaya saing, mandiri, dan berkelanjutan.





Evaluasi SPMB untuk Pendidikan yang Lebih Baik. Sebagai upaya mengidentifikasi kendala dan mendorong perbaikan proses penerimaan peserta didik agar berjalan sesuai ketentuan, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Pendidikan Jawa Timur melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMB SMAN/SMKN Tahun Ajaran 2026-2027. Kabupaten Malang 5-6 Oktober 2026



Selaraskan Anggaran Infrastruktur, Optimalkan Pendapatan Daerah Memperkuat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran infrastruktur sumber daya air serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Banggar DPRD Provinsi Jawa Timur membuka ruang dengar pendapat bersama Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Recap 16-22 Oktober 2026

Agenda Komisi dan Badan

Komisi E bahas raperda APBD 2027 pembahasan rancangan peraturan daerah raperda tentang APBD Tahun Anggara 2027 Bersama mitra komisi E terus berlanjut. Rapat kerja ini menjadi bagian dari proses pembahasan anggaran untuk memastikan program dan alokasi belanja daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat.







Komisi A bahas Raperda APBD 2027 Komisi A DPRD Jawa Timur menggelar rapat kerja Bersama mitra Komisi A di Pandaan, Pasuruan pada 20-21 Oktober 2026 guna membahas penyusunan Raperda APBD Provinsi Jawa Timur Anggaran 2027 kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses pembahasan anggaran daerah guna mendukung perencanaan program dan pembangunan Jawa Timur







Ketua BAPEMPERDA Yordan M. Batara Goa dan Ketua Fraksi PKS Lilik Hendarwati menerima masa aksi damai yang berasal dari aliansi ulama, tokoh, dan aktivis Jawa Timur. Kamis, 22 Oktober 2026

Recap 23-29 Oktober 2026

Agenda Komisi dan Badan



Dorong peningkatan PAD melalui optimalisasi asset ketua DPRD bersama komisi C DPRD Jawa Timur membahas strategi peningkatan asli daerah melalui optimalisasi asset Bersama dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur UOBK RSUD dan UPT Dinas Kesehatan

Komisi C DPRD Jawa Timur Bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur membahas optimalisasi asset idle dan bermasalah pembahasan ini bertujuan mengidentifikasi kendala serta merumuskan Langkah penyeleseian agar asset daerah dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal





mengusung tema merawat tradisi melestrasikan budaya dan menguatkan jati diri bangsa DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar pagelaran wayang kulit dalam rangka memperingati hari jadi ke 81 Provinsi Jawa Timur. Acara ini disemarakkan oleh aksi panggung dalang Ki Arif Sarjono yang membawakan lakon wahyu jitabsara diselingi hiburan khas jawa timur dari cak percil, abah kirun hingga komedi guyon maton

Recap 30-31 Oktober 2026

Agenda Komisi dan Badan





Untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas badan kehormatan (BK). BK DPRD Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Kabupaten Malang dan DPRD Kota Malang membahas langkah strategis dalam optimalisasi penegakan kode etik anggota DPRD guna menjaga kehormatan dan integritas lembaga legislatif.

TERIMA ASPIRASI ALIANSI ULAMA DAN TOKOH JATIM SOAL PEMAKZULAN GIBRAN, LILIK HENDARWATI SIAP KAWAL HINGGA DPR RI

Oktober 22, 2026

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyatakan kesiapannya mengawal aspirasi Aliansi Ulama, Kiai, Habaib, dan Tokoh Jawa Timur yang mendatangi Gedung DPRD Jatim, Kamis (22/10/2026). Aspirasi terkait tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut akan diteruskan kepada DPR RI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional. Aksi tersebut dilanjutkan dengan audiensi di dalam Gedung DPRD Jatim. Sebanyak 20 orang perwakilan massa dipersilakan masuk untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota dewan.



Perwakilan aliansi diterima oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati bersama anggota DPRD Jatim Yordan M. Batara.

Dalam pertemuan itu, Rahmat Mahmudi, Ketua Pergerakan Umat Islam Indonesia sekaligus koordinator aliansi, menjelaskan bahwa kedatangan mereka merupakan bentuk kepedulian terhadap persoalan ketatanegaraan yang sedang menjadi perhatian kelompoknya. Rahmat menyampaikan bahwa aliansi menuntut pemakzulan Gibran dari jabatan wakil presiden. Tuntutan tersebut, menurutnya, berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran dan putusan Mahkamah Konstitusi yang mereka rujuk. Klaim dan penafsiran aliansi tersebut merupakan dasar aspirasi mereka, bukan kesimpulan hukum yang telah dipastikan dalam audiensi.

"Aspirasi utama kami adalah pemakzulan Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Kami memahami bahwa DPRD Jawa Timur tidak memiliki kewenangan langsung untuk memproses hal tersebut. Karena itu, kami datang untuk menitipkan aspirasi kepada wakil rakyat agar diteruskan kepada lembaga yang berwenang," ujar Rahmat. Ia menjelaskan bahwa aliansi membawa pernyataan sikap berisi tujuh tuntutan. Pihaknya berharap dokumen tersebut dapat diteruskan kepada DPR RI, sementara surat kepada Mahkamah Konstitusi dan MPR RI akan dikirimkan secara langsung.

Menanggapi aspirasi tersebut, Lilik Hendarwati menyampaikan apresiasi atas kehadiran para ulama, kiai, habaib, tokoh masyarakat, dan aktivis yang memilih menyampaikan pandangannya melalui forum audiensi. Menurut Lilik, DPRD merupakan rumah aspirasi masyarakat. Karena itu, setiap masukan yang disampaikan warga harus didengarkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan serta mekanisme yang berlaku.





"Kami sangat menghargai kehadiran panjenengan semuanya yang menunjukkan kepedulian luar biasa untuk tetap menyuarakan aspirasi masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tentu menjadi tugas kami untuk mendengarkan apa yang menjadi harapan masyarakat," ujar Lilik. Lilik menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan dalam audiensi telah diterima dan dicatat. Ia pun menyatakan kesiapan untuk membantu meneruskan dokumen pernyataan sikap aliansi kepada DPR RI.

"Hari ini kami terima, kami dengarkan betul-betul, dan kami catat. Insyaallah kami siap menyampaikan dan mengawal aspirasi ini hingga sampai kepada DPR RI," tegasnya. Meski demikian, Lilik menyampaikan bahwa DPRD Jawa Timur tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tuntutan pemakzulan Gibran. "Kita harus menghargai dan menghormati konstitusi. Kami juga harus menjaga marwah sebagai anggota DPRD. Tugas kami di sini adalah menerima aspirasi dan meneruskannya kepada pihak yang memiliki kewenangan," jelasnya.

Lilik berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat terus terjalin secara terbuka. Ia memastikan aspirasi yang disampaikan aliansi tidak berhenti pada forum audiensi, melainkan akan diupayakan untuk diteruskan kepada pihak yang dituju. "Kami siap mendengarkan dan memberikan tindak lanjut atas apa yang disampaikan hari ini, tentu sesuai dengan kewenangan dan koridor konstitusi," pungkasnya.

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



JATIM POS .CO
JATIM POS ONLINE

Datangi DPRD Jatim, Aliansi Ulama Minta Polemik Ijazah Gibran Ditindaklanjuti



DPRD Jatim Pastikan Aspirasi soal Pemakzulan Gibran Diteruskan ke DPR



bacasaja.id

Ketua Fraksi PKS Tegaskan Akan Jembatani Aspirasi Pemakzulan Gibran ke DPR RI



MAKLUMAT.id

Aliansi Ulama Tuntut Pemakzulan Wapres Gibran, Titip Aspirasi ke DPRD Jatim



BANK JATIM BIDIK KREDIT ASN DI 47 OPD, LILIK HENDARWATI: JANGAN SAMPAI BEBANI PEGAWAI

Oktober 27, 2026

Rencana Bank Jatim menawarkan kredit konsumer kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat dukungan anggota Komisi C DPRD Jatim, Lilik Hendarwati. Namun, ia mengingatkan agar ekspansi bisnis tersebut tidak berujung pada bertambahnya beban keuangan pegawai. Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim itu menilai, perluasan layanan kredit dan aktivasi layanan digital JConnect merupakan bagian dari upaya Bank Jatim meningkatkan kinerja bisnis. Meski demikian, penawaran kredit harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen. "Dalam pandangan saya, ikhtiar Bank Jatim membenahi kinerja kreditnya dengan menyasar staf OPD tidak ada salahnya dan tidak harus kita baca dengan kacamata negatif," ujar Lilik.

Ia menegaskan, seluruh penawaran kredit harus bersifat sukarela. Tidak boleh ada kewajiban maupun tekanan dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang membuat ASN merasa harus mengambil pinjaman. "Saya mendukung perluasan layanan Bank Jatim kepada ASN, dengan catatan seluruh penawaran kredit harus bersifat sukarela, tanpa kewajiban atau tekanan dari OPD. ASN harus bebas menerima atau menolak sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan," tegasnya. Menurut Lilik, keberhasilan program kredit konsumer tidak cukup diukur dari besarnya nilai pinjaman yang disalurkan. Kualitas kredit dan manfaat nyata bagi nasabah juga harus menjadi tolok ukur, sehingga target bisnis perbankan tidak mengorbankan kesejahteraan pegawai.

"Target bisnis perbankan wajar, mestinya ada, tetapi harus disertai prinsip kehati-hatian. Keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah kredit yang tersalurkan, melainkan juga kualitas kredit dan manfaatnya bagi para ASN sendiri. Jangan sampai peningkatan kinerja bank justru menambah beban pegawai," paparnya. Lilik juga meminta Bank Jatim memberikan informasi secara lengkap sebelum ASN mengambil keputusan. Informasi itu mencakup suku bunga, besaran angsuran, tenor, biaya tambahan, serta kewajiban lain selama masa kredit. Calon nasabah juga perlu mendapatkan konsultasi dan simulasi pembiayaan agar dapat menilai kesesuaian cicilan dengan kondisi keuangan masing-masing.

Selain transparansi produk, perlindungan data pribadi menjadi perhatian penting. Penggunaan data ASN untuk penawaran produk perbankan, menurut Lilik, harus berdasarkan persetujuan yang sah dan sesuai ketentuan perundang-undangan. "Data pribadi juga wajib digunakan berdasarkan persetujuan sah dan dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi, transparansi dan perlindungan konsumen perlu dipastikan benar-benar dijalankan," katanya. Sebelumnya, Bank Jatim bersiap menawarkan kredit konsumer sekaligus mendorong aktivasi layanan digital JConnect kepada ASN Pemprov Jatim. Program tersebut menyasar 47 perangkat daerah setelah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim meminta jajaran OPD memfasilitasi pelaksanaannya.

Permintaan itu tertuang dalam surat Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni bernomor 900/7387/204.3/2026 tertanggal 27 Oktober 2026. Surat tersebut meminta kepala perangkat daerah memfasilitasi kegiatan aktivasi JConnect dan penawaran kredit konsumer bagi ASN di lingkungan kerja masing-masing. Kegiatan yang diusulkan meliputi sosialisasi produk kredit, konsultasi kebutuhan pembiayaan, simulasi kredit, informasi penambahan plafon atau top up, serta penawaran fasilitas kredit lainnya. Bank Jatim juga mengusulkan edukasi penggunaan JConnect dan pemberian insentif sesuai ketentuan program bagi ASN yang mengaktifkan layanan digital maupun memperoleh realisasi kredit.

Meski demikian, surat tersebut berfokus pada permintaan fasilitasi kegiatan. Dokumen itu belum merinci target jumlah ASN yang akan mengambil kredit, nilai pembiayaan yang dibidik, maupun jadwal pelaksanaan di masing-masing perangkat daerah. Lilik menegaskan, Bank Jatim sebagai aset strategis Jawa Timur perlu terus didukung agar tumbuh sehat dan berkontribusi optimal bagi perekonomian daerah. Namun, penguatan bisnis harus berjalan beriringan dengan perlindungan nasabah. "Prinsipnya sederhana saja, Bank Jatim harus semakin sehat, dan ASN yang dilayani juga harus semakin sejahtera," pungkasnya.



Target bisnis perbankan wajar, mestinya ada, tetapi harus disertai prinsip kehati-hatian. Keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah kredit yang tersalurkan, melainkan juga kualitas kredit dan manfaatnya bagi para ASN sendiri. Jangan sampai peningkatan kinerja bank justru menambah beban pegawai

Hj. Lilik Hendarwati, S.Ak
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Ketua Fraksi PKS

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



DPRD Jatim Ingatkan Bank Jatim soal Kredit ASN

Penulis : Editor Harian Bhirawa 27 Oktober 2026

DPRD Jatim, Bhirawa – Rencana Bank Jatim menawarkan kredit konsumer kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mendapat dukungan anggota Komisi C DPRD Jatim, Lilik Hendarwati.



LINGKARAN

HOME POLITIK & PEMERINTAHAN UMUM OLAHRAGA EKBIS HYPE EDUKASI JEDA NGOPI

Kredit ASN Pemprov Jatim Jadi Bidikan Bank Jatim, Lilik Hendarwati Ingatkan Soal Cicilan

Hype



MAKLUMAT

Beranda Topik Kilas Opini Hikmah Sosok Terkini Video

Lilik Hendarwati Dukung Kredit ASN Bank Jatim, Ingatkan Jangan Bebani Pegawai

Zaki Zubaidi 27 Oktober 2026

Anggota Komisi C yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, berharap agar jajaran direksi dan komisaris baru Bank Jatim mampu melakukan pembenahan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap perbankan BUMD itu. (Foto: Fraksi PKS) Cari Pew Wilayah

MAKLUMAT – Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, mendukung rencana Bank Jatim menawarkan kredit konsumer kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Namun, ia mengingatkan agar program tersebut tidak menambah beban keuangan pegawai.

TAK SEKADAR DROPING AIR, PUGUH DORONG SOLUSI PERMANEN ATASI KRISIS AIR BERSIH

Kamis, 1 Oktober 2026

RADAR MALANG – **Krisis air bersih** kembali menghantui sejumlah wilayah **Kabupaten Malang** setiap musim kemarau. Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Malang Raya, **Dr. Puguh Wiji Pamungkas**, MM. Selain menyalurkan bantuan air bersih, dia mendorong pemerintah menyiapkan solusi permanen untuk mengatasi kekeringan yang berulang. Puguh turun langsung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di salah satu desa di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kamis (1/10). Wilayah tersebut menjadi salah satu kawasan yang rutin mengalami kesulitan air bersih ketika musim kemarau tiba.

Dalam beberapa hari terakhir, distribusi air bersih telah dilakukan di sekitar 25 titik. Total bantuan tersebut diperkirakan menjangkau sekitar 3.350 warga yang terdampak. Menurut Puguh, distribusi air bersih menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Sebab, air yang diterima warga tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi, tetapi juga memasak, mencuci, hingga keperluan rumah tangga lainnya. Air bersih bagi mereka saat sekarang ini seperti kebutuhan pokok, sebagaimana beras yang dimakan sehari-hari. Air adalah sumber kehidupan," kata Puguh. Dia pun mengapresiasi berbagai pihak yang ikut membantu proses distribusi. Dengan kolaborasi tersebut, bantuan bisa menjangkau masyarakat di sejumlah titik yang mengalami kesulitan air.



Namun, Puguh menilai pola penanganan kekeringan tidak boleh berhenti pada bantuan air bersih. Menurutnya, droping air merupakan langkah penanganan sementara untuk memenuhi kebutuhan warga saat krisis terjadi. Sementara itu, wilayah yang setiap tahun mengalami kekeringan sebenarnya dapat dipetakan berdasarkan data pemerintah maupun BPBD. Data tersebut, lanjut dia, semestinya menjadi dasar untuk membangun infrastruktur air secara permanen.

"Secara kuratif masyarakat hari ini diberi bantuan air bersih untuk kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi jangka panjangnya, pemerintah harus hadir dengan melakukan langkah-langkah yang taktis," ujarnya. Salah satu langkah yang didorong yakni pembangunan sumur dan tandon berkapasitas besar di kawasan yang memungkinkan. Sedangkan wilayah yang memiliki sumber mata air dapat diperkuat dengan sistem penampungan dan distribusi sehingga air bisa dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan.

Puguh menyebut penanganan persoalan tersebut membutuhkan sinergi lintas pemerintahan. Mulai pemerintah desa, Kabupaten Malang, Pemprov Jatim hingga pemerintah pusat. Sebab, pembangunan infrastruktur sumber air membutuhkan anggaran yang tidak selalu mampu ditanggung pemerintah desa. Harus segera dicarikan jalan keluar yang konkret sehingga menjadi solusi permanen terhadap peristiwa bencana kekeringan yang sering berulang terjadi setiap tahunnya," pungkasnya.



Secara kuratif masyarakat hari ini diberi bantuan air bersih untuk kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi jangka panjangnya, pemerintah harus hadir dengan melakukan langkah-langkah yang taktis

Dr. H. Puguh Wiji Pamungkas, MM
Anggota Komisi E DPRD Jatim,
Sekretaris Fraksi PKS

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)


RADAR MALANG

Tak Sekadar Droping Air, Puguh Dorong Solusi Permanen Atasi Krisis Air Bersih


Atasi Kekeringan Malang Selatan, Puguh DPRD Jatim Salurkan Air Bersih dan Desak Solusi Permanen


beritaLima

Kekeringan Berulang di Malang, Puguh Wiji Pamungkas Dorong Solusi Permanen


JATIM TIMES

Puguh DPRD Jatim Salurkan Air Bersih ke 25 Titik Kekeringan, Tekankan Solusi Permanen


Jakarta News

Air Bersih Langka Bak Emas, Aksi Turun Tangan Puguh Wiji Pamungkas Selamatkan 3.350 Warga Malang


ANTARA

Anggota DPRD Jatim minta solusi permanen atasi kekeringan


DPRD Jatim Minta Solusi Permanen untuk Kekeringan di Malang

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mendorong proses seleksi Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur periode 2027–2032 dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan figur yang kompeten serta representatif. Menurut Puguh, pergantian kepengurusan Dewan Pendidikan menjadi momentum penting untuk menghadirkan lembaga yang mampu menjembatani kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat, sekaligus mengawal peningkatan mutu pendidikan di Jawa Timur. "Dewan Pendidikan memiliki peran strategis dalam menjembatani implementasi regulasi pendidikan dengan harapan masyarakat. Karena itu, kita membutuhkan tokoh-tokoh yang kompeten dan representatif untuk mengawal berbagai persoalan pendidikan di Jawa Timur," ujar legislator PKS itu.

Puguh menyoroti sejumlah tantangan pendidikan yang masih perlu mendapat perhatian, mulai dari pemerataan kualitas pendidikan antardaerah, kesenjangan mutu sekolah di perkotaan dan pedesaan, keterbatasan akses serta infrastruktur pendidikan, hingga kesejahteraan guru. Ia berharap figur-figur yang terpilih nantinya tidak hanya memiliki kapasitas, tetapi juga memahami persoalan pendidikan secara langsung di berbagai wilayah Jawa Timur. Dengan begitu, Dewan Pendidikan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong perbaikan layanan pendidikan. "Harapannya, Dewan Pendidikan periode 2027–2032 bisa menjadi salah satu instrumen untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan yang masih kita hadapi. Jangan sampai kemajuan pendidikan hanya terlihat dari capaian tertentu, tetapi pemerataan kualitas dan aksesnya belum terpenuhi," tegasnya.

PUGUH DPRD JATIM DORONG SELEKSI DEWAN PENDIDIKAN 2027–2032 TRANSPARAN DAN REPRESENTATIF

OKTOBER 15, 2026



Puguh juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses seleksi agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi siapa saja yang akan mewakili kepentingan pendidikan di Jawa Timur. Menurutnya, Dewan Pendidikan harus benar-benar menjadi representasi kebutuhan masyarakat, khususnya peserta didik. Ia menjelaskan, peran Dewan Pendidikan tidak sebatas memberikan masukan, tetapi juga mengawasi pelayanan dan mutu pendidikan.

Apabila terdapat layanan pendidikan yang tidak sesuai dengan regulasi atau belum memenuhi harapan masyarakat, Dewan Pendidikan diharapkan dapat menindaklanjuti persoalan tersebut melalui rekomendasi kepada pemerintah provinsi. "Dewan Pendidikan juga harus terbuka terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat. Aspirasi itu perlu ditindaklanjuti dan diterjemahkan menjadi rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Dinas Pendidikan, agar pelayanan pendidikan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat," pungkasnya.



Dewan Pendidikan juga harus terbuka terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat. Aspirasi itu perlu ditindaklanjuti dan diterjemahkan menjadi rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Dinas Pendidikan, agar pelayanan pendidikan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Dr. H. Puguh Wiji Pamungkas, MM
Anggota Komisi E DPRD Jatim,
Sekretaris Fraksi PKS

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)


Klikwarta.com

Soroti Kesenjangan Kota-Desa, Legislator PKS Dorong Dewan Pendidikan yang Paham Lapangan


ANTARA

Legislator minta seleksi Dewan Pendidikan Jatim Transparan


LENTERA.co

Komisi E DPRD Jatim: Dewan Pendidikan Harus Kawal Mutu dan Pemerataan Layanan Pendidikan


Seleksi Dewan Pendidikan 2027-2032, Legislator Jatim Puguh Minta Pemerataan Kualitas dan Akses


CakrawalaNews.co
Sketsel, Mendengar dan Merasakan

DPRD Jatim Ingatkan Seleksi Dewan Pendidikan 2027–2032 Harus Transparan dan Representatif


Puguh DPRD Jatim Dorong Seleksi Dewan Pendidikan Jatim Transparan dan Representatif



Potongan Aplikator Ojol Maksimal 8 Persen, Harisandi DPRD Jatim Minta Pengawasan Diperketat

Komisi D DPRD Jawa Timur menyoroti kebijakan baru mengenai biaya platform atau potongan aplikator transportasi berbasis aplikasi. Aturan yang membatasi potongan aplikator maksimal 8 persen dinilai perlu dikawal agar benar-benar meningkatkan pendapatan bersih pengemudi ojek online (ojol). Anggota Komisi D DPRD Jatim, R. Harisandi Savari, mengatakan penurunan batas potongan dari sebelumnya maksimal 20 persen menjadi maksimal 8 persen harus dirasakan langsung oleh para pengemudi. "Penurunan potongan aplikator dari sebelumnya maksimal 20 persen menjadi maksimal 8 persen merupakan langkah positif. Tetapi yang paling penting adalah memastikan kebijakan ini benar-benar dilaksanakan dan berdampak langsung terhadap pendapatan bersih para pengemudi ojol," kata Harisandi.

Menurut legislator asal Sumenep tersebut, pengemudi ojol memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi digital. Karena itu, perlindungan terhadap pengemudi perlu menjadi perhatian pemerintah dan perusahaan penyedia aplikasi. Harisandi meminta implementasi aturan tersebut diawasi secara serius. Perusahaan aplikator perlu transparan dalam menjelaskan komponen potongan, skema insentif, biaya layanan, hingga perhitungan pendapatan yang diterima pengemudi. "Jangan sampai potongannya memang disebut 8 persen, tetapi kemudian muncul komponen biaya lain yang membuat penghasilan pengemudi tetap tergerus. Pemerintah harus memastikan tidak ada mekanisme yang justru mengakali semangat regulasi ini," tegasnya.

Ia menilai ukuran kesejahteraan pengemudi tidak cukup hanya dilihat dari persentase potongan aplikasi. Pendapatan yang diterima juga perlu dilihat setelah dikurangi biaya operasional, seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, dan kebutuhan kerja sehari-hari. Karena itu, pengawasan perlu memastikan perubahan kebijakan benar-benar memberikan dampak terhadap pendapatan bersih pengemudi, bukan sekadar mengubah angka potongan di atas kertas. Di sisi lain, Harisandi menegaskan keberlanjutan bisnis perusahaan aplikator juga perlu diperhatikan. Namun, keberlanjutan usaha tersebut harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap pengemudi sebagai bagian utama dalam ekosistem transportasi berbasis aplikasi. "Regulasi yang baik harus diikuti pengawasan yang tegas. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada mekanisme penanganan dan sanksi sesuai ketentuan," ujarnya. Harisandi berharap implementasi kebijakan tersebut dapat menciptakan ekosistem transportasi digital yang transparan, adil dan berkelanjutan, dengan tetap memberikan kepastian perlindungan bagi pengemudi maupun pengguna jasa.

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)







MAKLUMAT– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur mendorong pengembangan ekosistem produk halal yang terintegrasi untuk memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing produk lokal. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) juga diminta memprioritaskan fasilitasi bagi usaha mikro dan kecil (UMK), terutama dalam pengurusan sertifikasi halal dan pengembangan usaha. Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jatim, Harisandi Savari, menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (19/10/2026), saat menyampaikan tanggapan fraksi atas pendapat Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Produk Halal.

Harisandi menegaskan, pengembangan ekosistem produk halal tidak boleh berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif berupa sertifikasi. Kebijakan tersebut harus menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi daerah, peningkatan daya saing produk, perluasan kesempatan usaha, serta perlindungan konsumen. "Keberhasilan Perda ini nantinya perlu diukur bukan hanya dari tersusunnya program dan terbentuknya kelembagaan, melainkan juga dari meningkatnya kapasitas pelaku usaha, berkembangnya produk halal daerah, dan semakin luasnya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat," katanya.

Menurut PKS, Jawa Timur memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal, mulai dari sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan, koperasi, UMK, hingga pesantren dan lembaga pendidikan. Potensi tersebut perlu dihubungkan dalam ekosistem yang terintegrasi agar produk halal Jawa Timur mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus memperluas peluang di tingkat nasional dan internasional.

19 Oktober 2026

Dorong Ekosistem Produk Halal Terintegrasi, PKS DPRD Jatim Tekankan 5 Poin Penting



5 Poin Penguatan Ekosistem Halal

Dalam tanggapannya, Fraksi PKS menyoroti lima aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyempurnaan Raperda. Pertama, rencana pendirian Lembaga Pemeriksa Halal Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 perlu dikaji secara cermat. Kajian harus mencakup kebutuhan, kelayakan kelembagaan, ketersediaan auditor halal, kesiapan laboratorium, serta kemampuan keuangan daerah. PKS juga meminta kejelasan bentuk kelembagaan, ruang lingkup tugas, dan batas kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan pemerintah pusat maupun sistem jaminan produk halal nasional.

Kedua, pembagian peran antarperangkat daerah harus diatur secara jelas. Pengembangan ekosistem halal melibatkan berbagai sektor, mulai dari penyediaan bahan baku, produksi, pembiayaan, distribusi, hingga pemasaran. Karena itu, diperlukan koordinasi yang terarah, pembagian tugas terukur, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, pemerintah provinsi perlu memberikan insentif dan kemudahan bagi UMK, termasuk fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal dan keringanan retribusi pemanfaatan laboratorium milik daerah. PKS menilai bantuan harus tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses oleh pelaku usaha yang memiliki keterbatasan modal, informasi, maupun kapasitas pengelolaan.

Dukungan pemerintah juga perlu mencakup peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, pengemasan, pemasaran, dan akses distribusi. "Dengan demikian, sertifikasi halal tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi peningkatan kualitas dan pengembangan usaha," ucap Harisandi. Keempat, pengembangan sistem informasi ekosistem produk halal perlu terintegrasi dengan sistem jaminan produk halal pemerintah pusat. Sistem tersebut diharapkan mampu memetakan potensi produk, pelaku usaha, kebutuhan fasilitasi, sarana pendukung, serta peluang pasar.

PKS mengingatkan agar sistem informasi tidak menambah beban administratif bagi UMK. Pemerintah perlu memastikan kualitas dan keamanan data, kemudahan akses, pendampingan, serta peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha. Kelima, pengembangan kawasan industri halal dan wisata halal harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah provinsi, perencanaan pembangunan, tata ruang, dan kesiapan infrastruktur. Untuk kawasan industri halal, PKS mendorong keterhubungan antara bahan baku, fasilitas produksi, laboratorium, penyimpanan, transportasi, dan logistik. Pengembangan kawasan juga harus membuka peluang kemitraan bagi koperasi dan UMK serta memperluas kesempatan kerja. Sementara itu, pengembangan wisata halal perlu mengedepankan prinsip sukarela, inklusif, dan tidak diskriminatif. Peningkatan kualitas layanan harus tetap menghormati keberagaman masyarakat serta tidak menciptakan kewajiban baru tanpa dasar hukum.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)

MAKLUMAT.id

Beranda Topik Kilas Opini Hikmah Sosok Terkini Video

Dorong Ekosistem Produk Halal Terintegrasi, PKS DPRD Jatim Tekankan 5 Poin Penting

Zaki Zubaidi 19 Oktober 2026



Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jatim, Harisandi Savari. FOTO: Humas DPRD Jatim

MAKLUMAT– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur mendorong pengembangan ekosistem produk halal yang terintegrasi untuk memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing produk lokal. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) juga diminta memprioritaskan fasilitasi bagi usaha mikro dan kecil (UMK), terutama dalam pengurusan sertifikasi halal dan

Opini



Mode W
dari Dal
Hery Pur
4 Novemt



Prabow
Gagal
Boy Anu
4 Novemt



105 Tah
Surabay
Kader d
M. Ainul
3 Novemt



Gula-gu
Edi Aufkl
3 Novemt

Sosok



Profil An
28 Hari J
Dicopot F
Ponpes

SURYA.co.id, SURABAYA – Nama Agus Cahyono kembali menjadi sorotan setelah memberikan perhatian terhadap kasus dugaan suap perizinan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur itu melihat penanganan perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya persoalan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Menurut Agus, kasus tersebut juga semestinya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Ia menilai pembenahan diperlukan untuk menutup ruang yang selama ini berpotensi dimanfaatkan oknum dalam proses administrasi pertanahan. Sorotan Agus menjadi relevan karena Komisi A DPRD Jatim memiliki ruang lingkup kerja yang berkaitan dengan pemerintahan, perizinan, hukum, pemberantasan korupsi, hingga persoalan pertanahan. Pandangan tersebut disampaikan Agus sebagai respons terhadap operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Dalam perkara yang berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Penyidik kemudian melakukan serangkaian penggeledahan, termasuk di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Bagi Agus, perkara tersebut seharusnya tidak berhenti pada proses hukum. Ia berharap pemeriksaan dan pengusutan yang dilakukan KPK dapat menjadi titik awal untuk mengevaluasi sistem pelayanan pertanahan, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan dunia usaha. "Kejadian ini tentu kita prihatin, namun semoga bisa menjadi langkah awal perbaikan kinerja dan pelayanan publik," kata Agus kepada SURYA.CO.ID saat dihubungi dari Surabaya, Minggu (4/10/2026).



SOAL KASUS DI ATR/BPN, DPRD JATIM: HARUS JADI MOMENTUM PERBAIKAN PELAYANAN PERTANAHAN

Agus Cahyono Minta Layanan Pertanahan Tidak Menyisakan Celah

Dalam merespons kasus dugaan korupsi ATR/BPN, Agus tidak hanya menyoroti perilaku individu. Ia menempatkan persoalan tersebut dalam konteks sistem pelayanan publik yang menurutnya harus dibangun dengan aturan yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun DPRD Jawa Timur tidak memiliki kewenangan struktural langsung terhadap BPN karena lembaga tersebut merupakan instansi vertikal pemerintah pusat, fungsi representasi masyarakat tetap membuka ruang bagi dewan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan warga. Agus menilai kejelasan regulasi menjadi salah satu fondasi penting.

Kepastian mengenai standar operasional prosedur (SOP), mekanisme pengurusan dokumen, serta transparansi biaya diperlukan agar masyarakat mengetahui tahapan layanan dan tidak mudah diarahkan melalui jalur-jalur informal. "Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, BPN harus memberikan pelayanan yang terbaik," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu. Pernyataan tersebut menempatkan kualitas pelayanan sebagai persoalan yang tidak terpisahkan dari perlindungan masyarakat. Bagi warga yang berurusan dengan administrasi pertanahan, ketidakjelasan prosedur maupun biaya dapat menciptakan ketergantungan terhadap pihak tertentu yang menawarkan jalan pintas.

Area Abu-Abu Pertanahan Dinilai Perlu Diperketat

Agus juga menyoroti persoalan yang muncul ketika status tanah, izin, atau kepemilikan belum memiliki kejelasan. Kondisi semacam itu, menurut dia, berpotensi menciptakan ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Karena itu, penertiban tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan ketika dugaan pelanggaran telah terjadi. Sistem pelayanan dan pengawasan sejak tahap awal juga perlu diperkuat agar potensi penyimpangan dapat ditekan. "Dan pengusaha juga harus taat aturan, artinya semua pihak wajib mematuhi aturan demi kebaikan bersama," ungkap Agus.

Pesan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Agus melihat persoalan pertanahan sebagai tanggung jawab bersama. Aparatur memiliki kewajiban memberikan pelayanan sesuai aturan, sementara masyarakat dan pelaku usaha juga dituntut mengikuti prosedur yang berlaku. Dengan begitu, pencegahan praktik mafia tanah tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum. Kepastian hukum, transparansi administrasi, kepatuhan pengguna layanan, dan integritas aparatur harus berjalan secara bersamaan.

Agus Cahyono: Pembenahan SDM Sama Pentingnya dengan Regulasi

Selain aturan, Agus memberi perhatian khusus terhadap sumber daya manusia (SDM). Menurut dia, regulasi yang baik tetap dapat kehilangan efektivitas apabila tidak disertai aparatur yang memiliki integritas dan komitmen terhadap pelayanan publik. "Harus ada pembenahan total dari sisi regulasi maupun SDM," tandasnya. Pandangan itu menjadi bagian penting dari sorotan Agus karena persoalan pelayanan publik tidak semata-mata berkaitan dengan ada atau tidaknya aturan. Cara aturan diterapkan di lapangan, konsistensi petugas menjalankan SOP, dan keberanian menolak praktik transaksional turut menentukan kualitas layanan. Karena itu, pembenahan internal menjadi penting agar perubahan tidak berhenti pada pergantian prosedur administratif. Penguatan etika kerja, pengawasan internal, dan budaya pelayanan juga perlu berjalan beriringan.

DPRD Jatim Siap Jadi Jembatan Aduan Masyarakat

Dari sisi pengawasan, Agus memahami adanya batas kewenangan antara DPRD Provinsi Jawa Timur dan BPN. Karena BPN merupakan instansi vertikal pemerintah pusat, DPRD Jatim tidak dapat melakukan pengawasan langsung sebagaimana terhadap organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim. Namun, posisi tersebut tidak berarti dewan menutup mata terhadap persoalan pertanahan yang dialami masyarakat. Agus menyatakan DPRD dapat berperan sebagai penghubung untuk meneruskan persoalan warga kepada instansi pertanahan di Jawa Timur. "Jika ada permasalahan atau aduan masyarakat, kami akan mengordinasikannya dengan pihak Kanwil," ucapnya. Pernyataan tersebut memperlihatkan posisi Agus sebagai legislator yang berada di antara kepentingan masyarakat dan institusi pemerintahan. Ketika layanan pertanahan menimbulkan persoalan, kanal pengaduan menjadi penting agar keluhan tidak berhenti di tingkat masyarakat.

OTT KPK Jadi Momentum Evaluasi Layanan Pertanahan

Kasus OTT ATR/BPN menjadi lebih luas ketika dilihat dari dampaknya terhadap kepercayaan publik. KPK menetapkan delapan tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan pengurusan HGB dan kemudian melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk di Jawa Timur. Dalam konteks itu, dorongan Agus Cahyono agar ada pembenahan regulasi dan SDM menjadi relevan dengan kebutuhan memperkuat pelayanan pertanahan. Perbaikan sistem idealnya tidak hanya dilakukan ketika kasus besar muncul, tetapi menjadi evaluasi berkelanjutan terhadap prosedur, transparansi, pengawasan, dan integritas aparatur.

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan pembenahan pada akhirnya bukan hanya berapa banyak kasus yang berhasil diungkap. Indikator yang tak kalah penting adalah apakah warga dapat mengurus layanan pertanahan dengan prosedur yang jelas, biaya transparan, waktu yang terukur, dan tanpa harus menghadapi tekanan untuk memberikan imbalan di luar ketentuan. Dari posisi Agus Cahyono di Komisi A DPRD Jatim, persoalan tersebut menjadi bagian dari agenda yang bersinggungan dengan fungsi pemerintahan, perizinan, hukum, pemberantasan korupsi, dan pertanahan. Karena itu, bagi Agus, pengusutan kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan ATR/BPN semestinya tidak hanya menghasilkan proses hukum, tetapi juga mendorong perubahan sistem yang membuat pelayanan pertanahan lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)


Soal Kasus di ATR/BPN, DPRD Jatim: Harus Jadi Momentum Perbaikan Pelayanan Pertanahan


Skandal Suap ATR/BPN Disorot DPRD Jatim, Minta Evaluasi Layanan dan Sapu Bersih Oknum


OTT KPK dan Layanan ATR BPN

Sosok Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim yang Minta Sapu Bersih Oknum di Skandal Suap ATR/BPN



DANA CADANGAN PILKADA JATIM MULAI DIANGGARKAN RP250 MILIAR, AGUS CAH MINTA LAYANAN PUBLIK TETAP TERJAGA

Tidak semua wilayah Jawa Timur mudah dijangkau. Kondisi geografis berupa kepulauan, pegunungan hingga wilayah dengan akses transportasi terbatas membuat anggota DPRD Jatim terkadang membutuhkan waktu lebih panjang untuk menemui masyarakat dalam kegiatan reses. Persoalan itulah yang menjadi salah satu perhatian dalam perubahan ketiga Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Jatim. Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim, Agus Cahyono, mengatakan perubahan regulasi tersebut memberikan ruang penambahan masa reses apabila kondisi geografis atau lokasi tertentu memang sulit dijangkau. "Tambahan masa reses ini juga menunjang agar masyarakat yang tinggal di wilayah yang sulit dijangkau memperoleh kesempatan yang setara untuk menyampaikan aspirasi dalam kegiatan reses," ujar Agus dalam penyampaian laporan hasil pembahasan Raperda tersebut.



Legislator PKS ini menyampaikan, karakteristik wilayah Jawa Timur sangat beragam. Untuk mencapai sejumlah lokasi, anggota DPRD bisa membutuhkan perjalanan dengan beberapa moda transportasi, penyeberangan, akses jalan yang sulit, hingga menghadapi kondisi cuaca dan medan pegunungan maupun perbukitan. Karena itu, ketentuan baru tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah waktu reses secara bebas. Penambahan harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi serta melalui usulan tertulis dan mekanisme yang telah ditentukan. Selain durasi, Pansus juga memperjelas fasilitas yang dapat diberikan dalam pelaksanaan reses. Fasilitas tersebut antara lain sewa tempat atau penyelenggaraan kegiatan, konsumsi, perlengkapan kantor, uang harian peserta, serta kebutuhan penunjang lainnya.

Agus menegaskan, seluruh fasilitas tersebut merupakan biaya penyelenggaraan kegiatan, bukan tambahan penghasilan bagi anggota DPRD maupun honor bagi peserta reses. "Uang harian peserta reses merupakan biaya pendukung kegiatan, bukan honor maupun insentif," jelas Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim itu. Ketentuan teknis mengenai standar, mekanisme penyediaan, pengadaan, pembayaran hingga pertanggungjawaban fasilitas reses nantinya dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur. Agus menjelaskan, perubahan ketiga Perda Nomor 5 Tahun 2017 tidak hanya menyangkut fasilitas anggota DPRD. Regulasi ini juga menyesuaikan sejumlah ketentuan dengan perkembangan aturan nasional, termasuk kendaraan perorangan dinas, pengelolaan fasilitas daerah, pemindahtanganan kendaraan, uang jasa pengabdian serta klasifikasi belanja Sekretariat DPRD.

Perubahan tersebut, kata dia, merupakan hasil pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan konsultasi teknis dengan Kementerian Dalam Negeri. "Perubahan ini dilakukan untuk memastikan materi yang diatur selaras dengan peraturan perundang-undangan, tertib dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memadai untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Jawa Timur," katanya. Agus menekankan, esensi perubahan regulasi tersebut adalah memastikan fungsi representasi DPRD tetap bisa berjalan efektif di seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk daerah-daerah yang secara geografis memiliki tantangan akses. "Regulasi harus memberikan ruang yang cukup agar pelaksanaan fungsi representasi DPRD dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur," pungkasnya.



Dr. Agus Cahyono SHI. MHI.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Anggota Fraksi PKS

"Belanja pegawai harus aman. Jangan sampai penyusunan APBD menggunakan skema dengan harapan nanti akan mendapat tambahan anggaran pada perubahan APBD

Krisis air bersih akibat musim kemarau panjang di Kabupaten Lumajang kian mengkhawatirkan. Warga di sejumlah wilayah terpaksa berdesakan untuk mendapatkan pasokan air dari mobil tangki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Di tengah kondisi tersebut, Anggota DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk, turut menyalurkan bantuan air bersih menggunakan tangki pribadi setiap hari. Legislator PKS asal Lumajang itu mengatakan, bantuan air bersih menjadi langkah mendesak untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, ia mengingatkan bahwa penanganan darurat harus diikuti langkah konkret agar krisis serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau. "Dibutuhkan langkah struktural dan solusi permanen agar warga tidak terus-menerus menjadi korban kekeringan setiap kali musim kemarau tiba," kata Khusnul.

Menurutnya, distribusi air bersih melalui mobil tangki, baik dari pemerintah maupun bantuan pihak lain, perlu diperkuat. Ia juga secara pribadi mengerahkan tangki air untuk membantu warga terdampak setiap hari.Meski demikian, Khusnul menilai bantuan tersebut belum cukup untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu meningkatkan intervensi, terutama dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang mengalami krisis. "Kami mendesak agar volume dan frekuensi distribusi air bersih ditambah secara masif," tegasnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, dampak kekeringan di Lumajang telah meluas hingga belasan desa di sejumlah kecamatan. Jumlah warga yang mengalami krisis air bersih diperkirakan mencapai belasan ribu jiwa. Khusnul menilai kondisi tersebut membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara Pemprov Jatim, Pemerintah Kabupaten Lumajang, dan BPBD. Distribusi bantuan harus menjangkau wilayah yang paling membutuhkan agar warga tidak kesulitan memperoleh air untuk minum, memasak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.



WARGA LUMAJANG BEREBUT AIR BERSIH, KHUSNUL KHULUK DPRD JATIM TURUNKAN TANGKI BANTUAN

OKTOBER 14, 2026



Di sisi lain, ia mendorong pembangunan infrastruktur air bersih sebagai solusi jangka panjang. Langkah yang dapat dilakukan antara lain pembangunan jaringan pipa, pengeboran sumur di lokasi yang memungkinkan, serta optimalisasi sumber mata air di sekitar permukiman.Menurut Khusnul, pembangunan tersebut harus didasarkan pada pemetaan potensi sumber air dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah terdampak. Dengan begitu, warga tidak terus bergantung pada distribusi tangki setiap kali musim kemarau tiba. Ia berharap bantuan darurat yang saat ini dilakukan dapat berjalan beriringan dengan program mitigasi dan pembangunan infrastruktur air bersih yang berkelanjutan. “Jangan sampai setiap musim kemarau warga kembali kesulitan mendapatkan air. Pemerintah harus hadir dengan langkah konkret agar masyarakat memiliki akses air bersih yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



Kebakaran Hutan Bromo Meluas, Khusnul Khuluk Minta Pemprov Percepat Mitigasi dan Pemadaman

KANAL

Temukan lebih banyak

Buat Ikon Digital

Kelas Menulis

BERITA LIMA

KANAL KOTA



Karhutla Bromo Meluas, DPRD Jatim Desak Pemadaman dan Mitigasi Dipercepat

Kebakaran hutan dan lahan di Blok Bantengan, Gunung Bromo, mendorong DPRD Jawa Timur



Anggota DPRD Jatim Minta Pemerintah Percepat Mitigasi dan Pemadaman Karhutla Bromo

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Lumajang–Jember, Khusnul Khuluk

SURABAYA (Lensera) - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang merambah kawasan Blok Bantengan, Gunung Bromo, menjadi perhatian serius berbagai pihak. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Lumajang–Jember, Khusnul Khuluk, meminta pemerintah segera mempercepat upaya pemadaman sekaligus

HARI TANI NASIONAL: MENGAWAL KESEJAHTERAAN PETANI DAN PANGAN JAWA TIMUR

Oleh: H. Khusnul Khuluk, *Anggota Fraksi PKS dan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur*

Setiap 24 September kita memperingati Hari Tani Nasional. Momentum ini seharusnya tidak berhenti pada ucapan selamat dan seremoni. Hari Tani harus menjadi kesempatan untuk kembali bertanya: sudahkah petani Jawa Timur mendapatkan kehidupan yang layak dari pekerjaan yang begitu penting bagi kehidupan kita semua? Setiap hari masyarakat membutuhkan pangan. Nasi yang kita makan berasal dari sawah petani. Sayur dan buah yang tersaji di meja makan berasal dari kebun mereka. Berbagai kebutuhan pangan lainnya juga tidak terlepas dari kerja keras petani dan peternak. Karena itu, ada satu hal yang harus kita tegaskan: petani jangan hanya diminta menjaga pangan, tetapi kesejahteraan mereka juga harus dijaga.

Petani selama ini berada di garis depan dalam menjaga ketersediaan pangan. Mereka bekerja menghadapi panas, hujan, perubahan cuaca, serangan hama, kenaikan biaya produksi, hingga ketidakpastian harga ketika panen tiba. Ketika masyarakat membutuhkan pangan dengan harga terjangkau, petani dituntut meningkatkan produksi. Tetapi ketika harga hasil panen jatuh, petani pula yang sering kali menanggung kerugiannya. Di sinilah keberpihakan pemerintah menjadi sangat penting.



Produksi Naik, Petani Harus Sejahtera

Kita tentu perlu meningkatkan produksi pertanian. Ketahanan pangan membutuhkan produktivitas yang tinggi. Namun, ukuran keberhasilan pertanian tidak boleh berhenti pada berapa ton produksi yang dihasilkan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa pendapatan yang diterima petani? Petani bisa saja menghasilkan panen yang melimpah, tetapi jika harga jatuh dan biaya produksi tinggi, peningkatan produksi belum tentu meningkatkan kesejahteraan. Begitu pula ketika harga komoditas naik.

Kenaikan harga di tingkat konsumen tidak otomatis berarti pendapatan petani meningkat. Ada rantai distribusi yang panjang antara petani dan konsumen. Karena itu, posisi tawar petani dalam rantai pasok harus diperkuat. Petani membutuhkan harga yang layak, pasar yang pasti, dan rantai perdagangan yang adil. Pemerintah daerah perlu hadir untuk membangun ekosistem tersebut. Bukan dengan mengambil alih peran pasar, tetapi memastikan petani memiliki akses informasi, kelembagaan ekonomi, pembiayaan, teknologi, dan pasar yang lebih baik.

NTP Meningkat, Tetapi Jangan Cepat Berpuas Diri

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi petani adalah Nilai Tukar Petani atau NTP. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan NTP Jawa Timur pada Agustus 2026 mencapai 119,05, meningkat 1,35 persen dibandingkan Juli 2026, 117,46. Ini tentu menjadi kabar yang patut kita syukuri. Ada ruang optimisme bahwa daya tukar petani membaik. Tetapi sebagai wakil rakyat, kita tidak boleh berhenti pada angka statistik. Kita harus memastikan bagaimana angka tersebut dirasakan oleh petani di lapangan.

Sebab kondisi petani sangat beragam. Petani dengan lahan luas tentu memiliki kondisi yang berbeda dengan petani gurem. Petani padi menghadapi persoalan yang berbeda dengan petani hortikultura, perkebunan, peternak, maupun pelaku usaha tani lainnya. Karena itu, NTP harus menjadi salah satu indikator penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran kesejahteraan petani. Kita harus melihat pendapatan petani, biaya produksi, produktivitas, akses pasar, kepemilikan lahan, risiko usaha, dan kemampuan petani mendapatkan nilai tambah.

APBD Harus Hadir di Tengah Persoalan Petani

Pemerintah daerah memiliki instrumen penting melalui APBD. Anggaran pertanian harus benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan yang dihadapi petani. Irigasi harus berfungsi. Alat mesin pertanian harus tepat sasaran dan digunakan secara produktif. Benih dan sarana produksi harus tersedia. Penyuluhan harus hadir. Perlindungan terhadap risiko gagal panen harus diperkuat.

Tetapi lebih dari itu, pemerintah harus membantu membuka pasar bagi produk petani. Jangan sampai petani kita mampu menghasilkan produk berkualitas, tetapi kesulitan menjualnya dengan harga yang layak. Karena itu, penguatan koperasi, korporasi petani, BUMD, offtaker, industri pengolahan, dan berbagai jaringan pemasaran harus menjadi bagian dari ekosistem pertanian Jawa Timur. Kita ingin petani tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga ikut menikmati nilai tambah dari produk yang mereka hasilkan.

Hilirisasi Harus Menguntungkan Petani

Jawa Timur memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Tetapi potensi tersebut akan semakin bernilai apabila kita mampu membangun hilirisasi. Komoditas pertanian jangan berhenti ketika keluar dari sawah, kebun, atau kandang. Gabah dapat diolah menjadi berbagai produk pangan. Jagung dapat dikembangkan dalam rantai industri yang lebih panjang. Buah dan sayuran dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. Komoditas perkebunan memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui industri pengolahan. Namun kita harus memastikan bahwa hilirisasi tidak hanya menguntungkan pelaku industri. Petani harus mendapatkan bagian yang lebih baik dari nilai tambah tersebut. Karena itu, hubungan antara petani, koperasi atau korporasi petani, industri pengolahan, pembiayaan, dan pasar harus dibangun secara adil dan transparan.

Membela Petani Berarti Menjaga Masa Depan Pangan

Sebagai anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, saya melihat bahwa keberpihakan kepada petani harus terus diperjuangkan dalam kebijakan ekonomi daerah. Kita membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berbicara tentang produksi, tetapi juga pendapatan. Tidak hanya berbicara tentang bantuan, tetapi juga kemandirian. Tidak hanya berbicara tentang komoditas, tetapi juga nilai tambah.Petani tidak boleh ditempatkan hanya sebagai penerima program pemerintah. Petani harus dipandang sebagai pelaku utama ekonomi daerah. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pertanian harus menjawab satu pertanyaan sederhana: Apakah kebijakan ini membuat petani lebih sejahtera dan lebih berdaya? Jika jawabannya belum, maka kebijakan tersebut harus terus diperbaiki.

Hari Tani Nasional harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen tersebut. Kita ingin Jawa Timur bukan hanya menjadi daerah yang mampu menghasilkan pangan dalam jumlah besar, tetapi juga menjadi daerah yang mampu menghadirkan petani yang sejahtera, mandiri, berdaya saing, dan memiliki masa depan. Sebab pada akhirnya, menjaga petani berarti menjaga pangan. Menjaga pangan berarti menjaga kehidupan. Dan menjaga kehidupan berarti memastikan kesejahteraan mereka yang bekerja di garis depan pangan Jawa Timur.
Selamat Hari Tani Nasional.



Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur mengikuti Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEKNAS) yang dilaksanakan di Jakarta, 19–21 Oktober 2026.



Rapat Fraksi
Oktober



Bertemu konstituen dalam rangka menyampaikan aspirasi



Penyaluran dan pendistribusian bantuan air bersih tanggap darurat untuk masyarakat yang terdampak krisis air bersih/kekeringan di Desa Sumberagung
Malang, 1 Oktober 2026



Sharing Insight GKamp jatim 2026



Hari Jadi Kota Batu Ke - 25

Terwujudnya koordinasi dan pemantapan silaturahmi antar-lembaga legislatif, pemerintah daerah, Forkopimda, serta tokoh masyarakat Jawa Timur.





Oktober 2026
Konstituen Dapil 9





Oktober 2026
Konstituen Dapil 9

Galeri Foto Kegiatan





Oktober 2026
Konstituen Dapil 5





Oktober 2026
Konstituen Dapil 5





Oktober 2026
Konstituen Dapil 5



Pelatihan dan Peningkatan SDM Ekonomi Kreatif 24 Agustus 2026 Lumajang

18 Oktober 2026
Ponpes Al mawardi Soklancar Desa Larangan Tokol

FRAKSI PKS
PROVINSI DPRD
JAWA TIMUR

PKS

www.fraksipksjatim.id

fraksipksjatim